

BAB III

PERJANJIAN DAMAI OSLO I DAN OSLO II

Upaya perdamaian di tanah Arab telah diupayakan oleh pemerintah dunia, konflik yang terus berkepanjangan antara Palestina dan Israel bermula ketika perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel tidak berjalan lancar. Perjanjian Camp David yang disetujui oleh pemerintah Mesir dan Israel yang mengindikasikan pengembalian Semenanjung Sinai kepada Mesir dan pembahasan pembentukan pemerintahan otonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai masa depan Palestina dianggap gagal. Diwaktu yang sama, Israel menilak untuk melakukan negosiasi dengan PLO berujung dengan berbagai macam konflik seperti Perang Lebanon 1982 dan pembantaian di Kamp pengungsian Sabra dan Shatila pada 16-18 September 1982. Semakin memanasnya hubungan antara Palestina juga ditandai dengan pecahnya perang intifada atau perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di jalur Gaza, Tepi Barat dan Jersalem Timur pada tahun 1987. Perjanjian damai antara Palestina dan Israel terus diupayakan untuk menekan terjadinya pelebaran konflik dengan beberapa perjanjian seperti perjanjian OSLO I dan OSLO II.

A. Perjanjian Madrid

Sebelum dunia mengenal perjanjian Oslo I, Palestina dan Israel telah melakukan beberapa perjanjian yakni konfrensi Madrid. Konfrensi Madrid adalah perundingan yang di laksanakan di Madrid yang diprakarsai oleh Pemerintah Spanyol dan didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet

pada 30 Oktober 1991 di Madrid. Adapun negara yang terlibat dalam konferensi Madrid yakni Israel, Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Konferensi Madrid pada tahun 1993 telah mencapai putaran kesepuluh yang diselenggarakan di Washington. Namun, dilain tempat yaitu di Oslo, Norwegia juga telah dilakukan pertemuan rahasia diluar putaran perundingan Madrid, hal tersebut pertamakali di pertanyakan oleh utusan Khisus AS yakni Dennis Ross yang bertanya kepada delegasi Palestina Hanan Ashrawi.

Perundingan di Washington yang merupakan putaran ke sepuluh dari konferensi Madrid merupakan perundingan resmi antara Israel dan Palestina. Perundingan di Washington tersebut telah mencapai keputusan hampir final dengan adanya pembuatan deklarasi prinsip penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Palestina yang akan diselenggarakan pertama di jalur Gaza yang dikenal dengan “Gaza Pertama”. Dilain pihak, perundingan di Oslo juga membahas masalah yang sama. Seuisai perundingan tersebut, delegasi Palestina menuju Tunis untuk meminta persetujuan Yasser Arafat untuk persetujuan kota Jericho sebagai simbol kedaulatan Palestina di Tepi Barat melalui proyek “Gaza-Jericho pertama”. Dilain pihak, perjanjian di Oslo juga telah semakin mencapai tahapan final.¹

Perundingan rahasia yang terjadi di Oslo masih belum diberitahukan kepada delegasi yang berada di Washington yakni Hanan Ashrawi oleh Yasser Arafat selaku pimpinan Palestina, dimana pada saat itu, Hanan Ashrawi telah mempersiapkan putaran kesebelas yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus hingga 14 September 1993. Pada tanggal 24 Agustus 1993, Hanan Ashrawi mendapatkan kabar bahwa perundingan di Washington tidak harus diadakan lagi karena telah ada perkembangan yang luar biasa di Oslo. Hanan yang

¹ Musthafa Abd Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta: Kompas, 2002 hlm :4

tidak mengetahui apapun segera berangkat ke Tunis untuk mendapat info lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Oslo. Setelah tiba di Tunis, Ashrawi, Faisal Huseini dan Akram Haniah (anggota delegasi Washington dari Palestina) mendapatkan penjelasan untuk kali pertama dari Ahmed Qurei (Ketua Parlemen Palestina) dan Hassan Ahfour (Menteri Negara Palestina) dengan pengarahannya dari Mahmud Abbas.

B. Perjanjian Oslo (1993)

Perundingan Oslo I yang diselenggarakan di Norwegia merupakan perundingan yang diadakan oleh PLO dan Israel, dimana pada deklarasi ini merinci prinsip-prinsip otonomi Jalur Gaza dan Jericho yang diharapkan akan menjadi awal proses pembentukan negara Palestina. Perundingan Oslo yang disembunyikan dari media masa merupakan dampak dari larangan Israel untuk dapat bertemu secara politik dengan Israel, yang mana akhirnya perundingan di Oslo terselenggara secara rahasia dibantu dan difasilitasi oleh Egeland (Diplomat Norwegia). Pada saat perundingan itu terjadi, Norwegia merupakan negara yang memiliki hubungan yang baik dengan kedua belah pihak hingga dapat mempertemukan pihak PLO dengan Israel secara informal.

Pertemuan Oslo I yang dibuka pada 20-11 Januari 1993 mempertemukan wakil Israel yang bukan orang pemerintah Israel dengan PLO. Pertemuan di Oslo awal tidaklah membahas mengenai isu politik melainkan isu sosial-ekonomi di wilayah pendudukan, namun pada akhirnya pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan politis. Perundingan di Oslo kembali di mulai pada 4 Maret 1993 dengan melibatkan pejabat Israel seperti Uri Savir, pejabat tinggi kementerian luar negeri, Dedi Zucker, anggota parlemen dan dari pihak PLO adalah Ahmad Krai, Mahmoud Abbas, pejabat senior PLO. Pada tanggal 20 Agustus 1993, Shimon Peres mengunjungi Norwegia untuk melihat hasil deklarasi yang pada

kemudian hari hasil tersebut dijelaskan kepada meteri Luar Negeri AS, Warren Christopher.²

Perundingan Oslo I terungkap pada media masa pada 28 Agustus 1993 yang mana pada tanggal 30 Agustus 1993 PM Rabin menjelaskan mengenai rencana pemberian otonomi Gaza dan Jericho. 13 September 1993 perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington D.C (bertepatan dengan perundingan damai kesebelas) oleh Mhamoud Abbas oleh Mahmoud Abbas mewakili PLO dan Shimon Perez mewakili Isarel. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Waren Christopher dari Amerika dan Andrei Kozyrev dari Rusia, didepan presiden A.S Bill Clinton dan perdana menteri Israel Yitzhak Rabin dengan ketua PLO Yasser Arafat.

Dalam perjanjian tersebut PLO menyatakan bahwa PLO mengakui Israel untuk hidup secara damai dan amana, serta menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338, berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai, mengancam penggunaan terorisme dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam perjanjian PLO yang menolak hak Israel untuk eksis tidak lagi valid dan berjanji untuk menunjukkan komitmen tersebut ke Dewan Nasional Palestina. PLO merupakan satu-satunya perwakilan Palestina dalam negosiasi perdamaian, namun Arafat gagal dalam memberikan hasil konkrit dalam konsensi penarikan mundur Israel di wilayah Palestina. Berikut merupakan beberapa Deklarasi Prinsip:³

1. Dua bulan setelah deklarasi disetujui, Israel akan menandatangani persetujuan untuk menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan kota tua Jericho. Seluruh pasukan

² Anwar. M Aris: *Israel Is Not Real: Negara Fiktif di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. Hal 112

³ Tempo, *Pasal-pasal Oslo*, Diakses: <https://majalah.tempo.co/konten/1993/09/11/LN/3224/Pasalpasal-oslo/28/23>, (31 Mei 2015)

akan ditarik tidak lebih dari empat bulan setelah perjanjian ditandatangani. Tetapi dengan catatan, Israel tetap mengontrol pintu-pintu masuk ke Gaza dan Jericho dan mengawasi keamanan seluruh wilayah.

2. Bangsa Palestina akan diberi kontrol penuh bagi urusan dalam negerinya sendiri. Tapi, belum boleh menyatakan kedaulatannya di kedua wilayah yang dikosongkan dari tentara Israel tersebut.
3. Segera setelah berlakunya deklarasi prinsip dan penarikan pasukan, Palestina berwenang mengatur semua urusannya di seluruh Tepi Barat, yang meliputi kepolisian, pendidikan, kesejahteraan sosial, pajak dan pariwisata.
4. Dalam kurun waktu 9 bulan setelah deklarasi prinsip diberlakukan, akan dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Palestina. Dewan terpilih yang mempunyai kekuasaan legislatif inilah yang akan memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat selama masa transisi yang dijanjikan tidak akan lebih dari lima tahun.
5. Untuk sementara waktu, dalam masa transisi, permukiman Yahudi di jalur Gaza dan Tepi Barat tetap berada di bawah yuridiksi Israel. Setelah itu, penduduk di kawasan tersebut boleh memilih tunduk pada pemerintah Palestina atau kembali ke Israel.
6. Perundingan terhadap status seluruh wilayah bekas pendudukan Irael dan Yerusalem Timur itu akan dimulai dalam waktu dua sampai tiga tahun kemudian.

Isi dari Perjanjian Oslo I (1993) terdiri dari tujuh pasal dan empat pasal tambahan yaitu⁴:

1. Pasal I tujuan Negosiasi: Menciptakan sebuah kekuasaan sendiri Interim bangsa Palestina, pemilihan dewan bagi rakyat Palestina di tepi Barat dan Jalur Gaza, bagi suatu periode transisi yang tidak lebih dari kurun waktu lima tahun menuju suatu penyelesaian perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan no 242 dan no 338.
2. Pasal II Kerangka Kerja Bagi Periode Interim Kerangka kerja yang disepakati bagi periode interim sudah diajukan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip ini.
3. Pasal III Pemilu Rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa memerintah berdasarkan prinsip prinsip demokrasi, langsung, bebas dan politik umum, pemilu untuk memilih Dewan di bawah pengawasan yang disepakati.
4. Pasal IV Yuridiksi uridiksi Dewan tersebut akan mencakup wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, kecuali Isu-isu yang akna dinegosiasikan dalam negosiasi-negosiasi permanen.
5. Pasal V Periode Transisi dan Negosiasi-Negosiasi Berstatus Permanen Periode transisi lima tahun akan dimulai bersamaan dengan penarikan mundur dari jalur Gaza dan kawasan Jericho. Negosiasi-negosiasi berstatus permanen akan dimulai segera mungkin yang mencakup isu-isu Yerussalem, para pengungsi, pemukiman, pengaturan-pengaturan keamanan, perbatasan-[erbatasan, hubungan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan isu-isu lainnya sesuai dengan kepentingan bersama.

⁴ Tesis Masyrofah, *Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I dan II)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 82-83

6. Pasal VI Persiapan Peralihan Kekuasaan dan Tanggung Jawab Pada saat diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip ini dan penarikan mundur dari jalur Gaza dan Jericho, sebuah peralihan dari pemerintah militer Israel dan Administrasi sipilnya kepada pihak Palestina dalam lingkup sebagai berikut: pendidikan dan kebudayaan, kesehatan sosial, perpajakan langsung, serta turisme.
7. Pasal VII Perjanjian Interim Perjanjian Interim ini akan menetapkan struktur dewan, jumlah keanggotaannya, serta peralihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah militer Israel dan Administrasi sipil ke Dewan.

Adapun dalam pasal-pasal tambahan Deklarasi prinsip-prinsip Kesepakatan Oslo terdiri dari empat pasal, yaitu:

1. Pasal Tambahan I Protokol tentang cara dan kondisi Pemilu
2. Pasal Tambahan II Protokol penarikan kekuatan militer Israel dari Jalur Gaza dan Kawasan Jericho
3. Pasal Tambahan II Protokol tentang Kerjasama Israel-Palestina dalam program-program ekonomi dan pembangunan
4. Pasal Tambahan IV Protokol tentang kerjasama Israel-Palestina berkaitan dengan pembangunan regional.

Dengan adanya perjanjian Oslo I diharapkan Palestina dan Israel selangkah lebih maju dalam meraih perdamaian diantara kedua belah pihak. Namun pada implementasinya beberapa kalangan mulai mempertanyakan isi perjanjian Oslo tersebut. Hal-hal yang dipertanyakan meliputi langkah awal kemerdekaan Palestina yang mana dalam perjanjian Oslo I tidak terkandung janji seperti harapan tersebut. Israel mengharapakan bahwa kesepakatan Oslo I mengarah pada perdamaian dengan rakyat Palestina yang bermukim di jalur Gaza dan Tepi Barat, dua jawasan yang terbelah oleh Israel. Selain itu permasalahan juga timbul dari beberapa hal seperti ketidak jelasan banyak pasukan yang akan ditarik oleh Israel

di wilayah sengketa serta ketidak jelasan status wilayah Jerusalem yang diklaim oleh kedua belah pihak.

A. Perundingan Kairo (1994)

Pada tanggal 4 Mei 1994, Arafat dan Rabin menandatangani kesepakatan di Kairo, Mesir. Perundingan Kairo merupakan perundingan lanjutan dari perundingan Oslo I. Berdasarkan kesepakatan pada tanggal 17 Mei 1994 secara resmi Palestina mengambil otoritas sipil di Jalur Gaza dan Jericho dari Israel. Pengambil-alihan kekuasaan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Israel di kedua wilayah tersebut, yang mana PLO mengambil alih tanggung jawan atas masalah-masalah perekonomian, pendidikan, perpajakan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kepariwisataan. Masalah-masalah luar negeri dan keamanan eksternal tetap berada di tangan penguasa Israel. Perjanjian Kairo menetapkan tiga poin penting, yakni⁵:

1. Israel mempunyai hak veto atas undang-undang atau peraturan lain yang dihasilkan oleh peraturan oleh parlemen PLO di Gaza dan Jericho.
2. Para pemukim yahudi akan terus dibiarkan hidup di Gaza dan Tepi Barat tetapi tidak tunduk dibawah undang-undangatau hukum PLO
3. Para polisi PLO tidak diizinkan menangkap warga Israel atau pemukim Yahudi yang melakukan pelanggaran hukum, hanya tentara Israel yang berhak menangkap mereka.

Perjanjian Kairo sebenarnya merupakan implementasi Oslo I, dan merupakan kelanjutan Perjanjian Camp David (1978-1979). Ketiga perjanjian tersebut dibuat ketika Israel mampu menekan Amerika untuk mendukung posisinya , yang berakibat dengan mudahnya Israel dapat mempermainkan isi

⁵ Masyrofah, Op. Cit, hal 90

perjanjian yang dibuat. Israel memang telah bersedia menyerahkan otoritas sipilnya pada PLO, dan negara Uni Eropa telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintah Arafat dalam membangun Gaza dan Jericho. Namun, permasalahan serius menghadang langkah Arafat seperti gerakan Anati-Israel dari kelompok Hamas dan Kelompok Islam Palestina lainnya, maka sikap anti Arab/Palestina dari kaum Yahudi militan merupakan tantangan yang serius bagi otoritas sipil PLO di Gaza dan Jericho.

Selain itu yang menjadi pertanyaan ialah status otoritas PLO dimana status PLO baru “otonomi terbatas dan sementara”, yang mana keberadaan PLO dapat sewaktu-waktu dicabut oleh Israel. Permasalah lain juga datang dari status kota Yerusalem, dimana status kota tersebut masih tidak jelas. Permasalahan yang masih terus timbul masih diharapkan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui jalan negosiasi.

A. Oslo II (1995)

Perjanjian Oslo II diambil di Washington DC pada 28 September 1995 dimana perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden PLO Yasser Arafat, PM Israel Yitzhak Rabin, dan dilaksanakan oleh Bill Clinton. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Israel harus menyerahkan 90 persen daerah Tepi Barat yang berpenduduk sekitar satu juta jiwa warga Palestina. Kesepakatan lainnya yang diambil ialah penarikan mundur Israel dari beberapa kota di Tepi Barat, yaitu Bethlehem, Jenin, Nablus, Qalqiyah, Ramallah dan Tulkarem dan 450 desa pada akhir 1995. Israel tetap memegang kontrol atas wilayah pemukiman Yahudi dan instalasi militer. Mengenai status kota Hebron akan dibahas pada negosiasi tahap berikutnya.

Setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo II, Palestina dan Israel melakukan penandatanganan perjanjian kota Hebron yang membicarakan status kota Hebron dan penarikan pasukan Israel di Taba pada 1995.⁶ Dokumen kesepakatan Oslo II yang ditandatangani di Taba dan Washington bulan September tahun 1995 terdiri dari 314 halaman. Berikut merupakan hal yang patut dicatat dari perjanjian Oslo II:⁷

1. Perjanjian itu merupakan suatu langkah yang positif, paling tidak bagi tiga pihak Yasser Arafat dan pendukungnya, pemerintah Partai Buruh di Israel dan Pemerintah Bill Clinton di Amerika. Namun, oleh karenanya, kelangsungan nasib perjanjian sangat tergantung pada Arafat, Rabin dan Clinton.
2. Penandatanganan perjanjian Oslo II menunjukkan adanya semacam paradoks, dimana PLO dalam posisi yang lemah, dan sebaliknya dengan Israel dan AS yang mana akhirnya implementasi perjanjian yang ada akan sangat tergantung pada pihak Israel dan Amerika.
3. Terealisasinya bukti negara pendonor yang masih belum ada bukti dari perjanjian Oslo I hingga Oslo II, padahal pada awal mulanya negara pendonor seperti eropa telah berjanji akan membantu pembangunan namun tidak teralisasi dan hanya tinggal janji.
4. Perbedaan persepsi perjanjian damai antara beberapa pihak seperti Arafat, yang mana pihak Arafat memandang bahwa perjanjian merupakan langkah awal dari sebuah perdamaian namun bagi pihak Israel, perwujudan negara Palestina hanyalah “mimpi”.

⁶ Kompas, *Perdamaian Tidak Mudah Dicapai*, 1998

⁷ Riza Sihbudi, *Menyandra Timur Tengah*, Jakarta :Mizan, 2007, hal 213

Pengambilan perundingan Oslo I dan II membawa dinamika tersendiri bagi kehidupan rakyat Palestina. Di lain sisi rakyat palestina dijanjikan dengan mimpi kebebasan dan kemerdekaan wilayahnya serta kehidupan yang layak yang mereka harapkan namun dilain sisi mereka harus dihadapkan pada kenyataan bahwa perundingan yang ada hanyalah mimpi yang diberikan dari Israel sebagai bentuk perpanjangan kekuasaan Israel atas tanah palestina. Dalam masyarakat Palestinam keadaan pro dan kontra juga dihadapi. Masyarakat Palestina yang sebagian besar terbagi dalam dua kubu yakni Fatah dan Hamas memberikan pandangan tersendiri dalam permasalahan perjanjian yang ada seperti, Fatah yang pro terhadap kesepakatan Oslo dan Hamas yang secara tegas menolak seluruh kesepakatan Oslo.